

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan menurut Haruman (2008). Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance*. Sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain manajemen pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan oleh Friese, Link dan Mayer (2006). *Corporate governance* sendiri terdiri dari kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir

tahun. Konsentrasi kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain menurut Tarjo (2008). Kepemilikan institusional memiliki intensif untuk membuat manajemen perusahaan membuat keputusan yang memaksimalkan kepentingan, kesejahteraan bersama para pemegang saham, dan menghindarkan kepentingan perilaku yang mementingkan diri-sendiri. Penelitian ini menggunakan kepemilikan institusional sebagai mekanisme eksternal perusahaan. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan menurut Faisal (2004).

Dewan komisaris independen dibentuk sebagai organ perseroan yang bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perseroan oleh Djalil (2000). Menurut Boedex (2010) dewan komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Secara garis besar tugas dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Menurut

Ikatan Komite Audit Indonesia IKAI (2004) hal tersebut terutama berkaitan dengan review system pengendalian intern perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Lalu menurut Firmsstat (2009) Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen

Irawan dan Farahmita (2012) mengatakan penerapan *corporate governance* tersebut diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Manajemen memegang peranan penting dalam memilih strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan. Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Pajak penghasilan merupakan beban bagi perusahaan

dan pemilik perusahaan, maka dari itu berbagai kebijakan dapat diambil oleh perusahaan guna menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan termasuk dalam pemilihan metode akuntansi sehingga dapat menurunkan besaran pajak efektif. Upaya mengurangi beban pajak yang dihasilkan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti penghindaraan pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Apabila upaya meminimalisasi dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*), maka tidak dianjurkan dalam prinsip manajemen dan etika bisnis. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan benar dalam meminimalkan beban pajak salah satunya yaitu dengan manajemen pajak yang mengikuti sesuai aturan yang legal. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat dikurangi untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2003).

Penelitian ini menggunakan variabel dependen manajemen pajak yang diprosikan dengan *Generally Accepted Accounting Principles Effective Tax Rate (GETR)* dan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. GETR adalah *effective tax rate* berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku, lalu CETR adalah *effective tax rate* berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan secara kas pada tahun berjalan. Penelitian yang disusun oleh Astrian, Puspa dan Ethika (2014) meneliti kepemilikan institutional, dewan komisaris independen, komite audit terhadap

CETR yang hasilnya kepemilikan institutional berpengaruh negatif signifikan terhadap CETR, dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap CETR, komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap CETR. Lalu menurut Meilinda dan Cahyonowati (2013) jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap GETR dan CETR, persentase komisaris independen tidak berpengaruh terhadap GETR dan CETR. Lalu Hanum dan Zulaikha (2013) meneliti komisaris independen, komite audit, kepemilikan konstitusional yang hasilnya komisaris independen tidak berpengaruh terhadap GETR, komite audit tidak berpengaruh terhadap GETR, kepemilikan institutional tidak berpengaruh terhadap GETR. Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan akan menentukan bagaimana arah perusahaan dalam menentukan manajemen pajak oleh Bernad (2011), bila *corporate governance* berpengaruh positif terhadap CETR dan GETR maka pengaruh terhadap manajemen pajak akan negatif dikarenakan pembayaran pajak dan beban pajak penghasilan meningkat dan sebaliknya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari corporate governance, apakah berpengaruh positif atau negatif terhadap manajemen pajak. Objek penelitian dilakukan pada sektor perbankan karena ingin mengetahui pengaruh corporate governance terhadap manajemen pajak, maka dari itu saya ingin menggunakan penelitian ini dengan perusahaan tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah mekanisme *corporate governance* mempengaruhi manajemen pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris pengaruh *corporate governance* yang diukur dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit terhadap manajemen pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengetahuan tentang pengaruh *corporate governance* yang diukur dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit terhadap manajemen pajak. Lalu sebagai pembanding dan acuan dengan penelitian-penelitian yang lain.

2. Bagi praktik :

Penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada perusahaan pengaruh *corporate governance* untuk mengambil kebijakan terhadap manajemen pajak. Untuk investor dapat mengetahui adanya kebijakan *corporate governance* yang mempengaruhi manajemen pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang akan menguraikan berbagai teori, konsep dan penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini, kerangka pikir penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang meliputi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel serta teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, serta pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.